

Pepali Ki Ageng Selo sebagai Konsep Etika Kewarganegaraan

Wawan Shokib Rondli⁽¹⁾

¹Program Studi PGSD, FKIP Universitas Muria Kudus

¹wawan.shokib@umk.ac.id

Abstract

The purpose of this research was to explore and uncover the values of Pepali Ki Ageng Selo as the ethics of citizenship. The research's method used qualitative philosophical approach with factual historical research method conducted by philosophical investigation which followed the way and direction of mind presented in the book entitled Pepali Ki Ageng Selo through interpretation, induction and deduction, interent coherence, holistic, historical continuity, idealization, comparison, heuristika, inclusion or analogical language, description, special methods and reflections of personal researchers. The results of the study revealed the values of Pepali Ki Ageng Selo as the ethics of citizenship. These values were the ethics of citizenship in the life of a nation consisted of (1) socio-cultural ethics; (2) political and governmental ethics; (3) economic and business ethics; (4) scientific ethics; and (5) environmental ethics. These values were the form of orders and prohibitions that should be implemented by citizens in order to achieve happiness. Thus, the results of this study can be a reference in the implementation of Citizenship Education, especially in the context of Pancasila as a political and state ethics. Excavation of philosophical values taught through Pepali Ki Ageng Selo certainly in an effort to strengthen the values contained in the ideology of Pancasila.

Keywords: *Pepali Ki Ageng Sela; National Ethics and Citizenship Ethics*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka sejak tahun 1945 hingga saat ini genap 72 tahun telah mencapai kemerdekaan. Akan tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih ada yang kurang terutama dalam hal etika berbangsa dan bernegara meski sudah banyak hal yang telah dicapai dan dapat dirasakan oleh warga negara seperti kebebasan berbicara dan otonomi daerah (Tambak, 2017). Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kejadian seperti korupsi, kasus peradilan yang kontroversial, dan penyalahgunaan wewenang yang senantiasa dinformasikan melalui berbagai media baik cetak, elektronik sampai jaringan internet. Situasi anomie ini terjadi karena individu dalam keadaan cemas serta berada pada posisi ambiguous dalam diri individu (Dunham, 1964, pp. 128–129; Powell, 1988, p. 8).

Perilaku menyimpang tersebut mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta menggambarkan masih rendahnya etiket dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut menjadi kerisauan dan perhatian yang serius oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk pemerintah untuk melakukan upaya pembangunan etika berbangsa dan bernegara, bahkan tiga lembaga negara telah menginisiasi untuk menggagas konvensi etika bernegara sekaligus melakukan sosialisasi TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Anonim, 2017). Upaya dalam pembangunan etika berbangsa dan bernegara salah satunya dapat diperoleh melalui penggalian nilai-nilai budaya kearifan lokal masing-masing daerah yang ada di seluruh wilayah Negara Keatuan Republik



Indonesia dalam upaya untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi maupun dasar negara. Salah satu kearifan lokal yang dapat digali nilai-nilainya yaitu pepali Ki Ageng Sela untuk dapat dijadikan sebagai konsep etika bernegara. Pepali adalah sebuah ajaran yang berupa larangan dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Akan tetapi ajaran tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh manusia karena merupakan sebuah warisan khusus (Prabowo, 2004). Proses pewarisan pepali Ki Ageng Sela terjadi salah satunya dengan cara akulturasi budaya dalam syair shalawat ahabul musthafa yang dipopulerkan oleh Al Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf (Khoiriyah, 2015).

Pepali Ki Ageng Sela syarat dengan nilai-nilai moral yang dapat digali secara mendalam untuk dapat dikonstruksikan menjadi konsep etika kewarganegaraan. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang benar dan salah (Al Muchtar, 2014). Sedangkan warga negara merupakan anggota dari sebuah komunitas yang membentuk suatu negara itu sendiri (Hikam, 1999, hlm. 166). Pada konteks negara Indonesia "Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara" (UUD NRI Tahun 1945 dan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika kewarganegaraan merupakan pelaksanaan tindakan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang sejalan

dengan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila. Bertolak dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pepali Ki Ageng Sela agar dapat menggali dan mengungkap nilai-nilainya, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pengembangan nilai-nilai etika kewarganegaraan dalam kerangka memperkokoh Pancasila sebagai etika kewarganegaraan. Harapannya hasil penelitian ini dapat menjawab kerisauan yang telah diungkap tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian pepali Ki Ageng Sela sebagai konsep etika kewarganegaraan dilakukan melalui pendekatan kualitatif filosofis dengan metode penelitian historis faktual. Penyelidikan dilakukan secara filsafat dengan mengikuti cara dan arah pikiran yang disajikan dalam buku yang berjudul Pepali Ki Ageng Selo karya R.M. Soetardi Soeryohoedoyo. Fokus pada bagian 1 nama lagu dan bentuk syair dhandhanggulo melalui interpretasi, induksi dan deduksi, koherensi interen, holistika, kesinambungan historis, idealisasi, komparasi, heuristika, bahasa inklusi atau analogikal, deskripsi, metode khusus dan refleksi peneliti pribadi (Sudarto, 2002).

III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Makna Pepali Ki Ageng Sela

Pepali Ki Ageng Sela merupakan ajaran yang disampaikan oleh Ki Ageng Sela pada masyarakat sekitar abad 16 untuk dijadikan pegangan/ pedoman



berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pepali merupakan sebuah ajaran yang bersifat perintah atau larangan yang dijadikan sebagai pegangan hidup agar terjaga kelestariannya (Abimanyu, 2014; Herusatoto, 2012; Hadiwijaya, 2010; Soeryohoedoyo, 1989; Poerwadarminta, 1939). Dengan kata lain pepali merupakan ajaran yang disampaikan oleh seseorang untuk orang lain agar dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dan dijaga kelestariannya. Sedangkan Ki Ageng Selo merupakan salah satu tokoh (filosof Jawa) yang hidup pada masa kerajaan Demak pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Trenggono (Ronika, 2019). Dengan demikian pepali Ki Ageng Selo merupakan ajaran isinya berupa perintah dan larangan yang hendaknya dilaksanakan dan ditinggalkan oleh masyarakat hingga saat ini untuk dijadikan pegangan/ pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Pepali Ki Ageng Selo sebagai Konsep Etika Kewarganegaraan

Berdasarkan makna pepali Ki Ageng Selo yang merupakan ajaran moral, religiusitas bahkan sampai spiritual untuk dijadikan pedoman pelaksanaan hidup bagi anak cucu dan masyarakat secara umum. Hal tersebut karena pepali Ki Ageng Selo mengajarkan tentang etika, moral, kepemimpinan, kesucilaan, keagamaan (Budiono dan Wiratama, 2017; Ronika, 2019). Dengan kata lain pepali tersebut dapat dikatakan sebagai etika kewarganegaraan karena

dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak oleh masyarakat dalam berbagai kehidupan. Hal ini sejalan dengan pendapat Herusatoto (2012) menyatakan bahwa pelaksanaan pepali yang tidak hanya untuk kelompok atau komunitas tertentu merupakan pelaksanaan pepali secara umum yaitu untuk semua golongan dan seluruh warga negara.

Dengan demikian pepali ini dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara maka dapat dikatakan pepali tersebut merupakan konsep etika berbangsa dan bernegara. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Kemudian etika dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu etika khusus dan etika umum (Suseno, 1987).

Selanjutnya akan dibahas secara mendalam konsep etika berbangsa dan bernegara dalam buku yang berjudul Pepali Ki Ageng Selo karya R.M. Soetardi Soeryohoedoyo fokus pada nama lagu dan bentuk syair dhandhanggulo. Pembahasan ini merujuk pada pendapat Lonto dan Pangalila (2016) menyatakan terdapat enam jenis etika dalam kehidupan berbangsa. Keenam jenis etika dalam kehidupan berbangsa sebagai berikut: (1) etika sosial budaya; (2) etika politik dan pemerintahan; (3) etika ekonomi dan bisnis; (4) etika penegakan

hukum dan peradilan; (5) etika keilmuan; dan (6) etika lingkungan.

1. Etika Sosial Budaya

Nilai-nilai pepali Ki Ageng Sela sebagai etika sosial budaya terdapat berbagai nilai dalam bait pertama pada tembang/ syair dhandhanggulo berbentuk larangan-larangan saat menjalankan hidup seperti jangan sombong, jangan bengis, jangan jahil, jangan serakah dan panjang tangan, jangan mencari pujian, jangan angkuh serta jangan berkehendak yang negatif. Selain berupa larangan terdapat perintah yang terdapat dalam bait kedua. Perintah tersebut antara lain diminta untuk meniru orang tua, mencintai kesusilaan, mencari berkah orang tua, karena orang tua memiliki pendirian yang halus, kalau berbicara, bertindak berhati-hati karena tidak menganggap mudah terhadap sesuatu hal. Dengan demikian dibutuhkan keteladanan perilaku oleh orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintahan melalui pembudayaan (Kansil dan Kansil, 2002:237). Pembudayaan nilai-nilai pepali Ki Ageng Sela masih terjaga sampai saat ini salah satu caranya dengan pendidikan agama dalam sektor informal melalui kegiatan sosial kultural.

Sebagai contoh akulturasi budaya dengan pembacaan syair shalawat dengan pepali Ki Ageng Sela oleh Habib Syeikh Abdul Qodir Assegaf dengan maksud tegaknya kehidupan spiritual, moral dan sosial (Khiriyah, 2017). Hal ini sejalan dengan pendapat Kansil (2002: 237) yang menyatakan etika sosial budaya membutuhkan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan

keaktivitas budaya dari masyarakat. Dengan demikian etika sosial budaya pada pepali Ki Ageng Sela membutuhkan penghayatan dan pengamalan yang dilandasi ajaran agama, kemampuan beradaptasi, ketahanan dan kreatifitas masyarakat demi tegaknya etika kewarganegaraan.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Nilai-nilai pepali Ki Ageng Sela sebagai etika politik dan pemerintahan terungkap pada bait ketiga dimana Ki Ageng Sela menyampaikan siapapun yang berbuat baik kelak akan mendapatkan kebahagiaan bahkan sampai pada anak dan keturunannya ikut serta merasakan. Lebih lanjut ia menyampaikan jika menjadi orang besar (maksudnya pemegang kekuasaan) ketika memerintah orang kecil (rakyat, orang yang diperintah) jangan keras keras, nanti menjadi tidak tulus dalam menjalankan tugas. Jika kamu menjadi seorang pelindung jangan sembarangan, perintahkan dengan tepat dan benar serta gunakan wewenang dengan sebaik mungkin. Hal ini sejalan dengan pendapat Kansil dan Kansil (2002:238) yang menyatakan bahwa etika politik dan pemerintahan hendaknya diwujudkan dalam bentuk sikap sesuai dengan tata krama dalam perilaku politik toleren (Lazzavietamsi, 2019), tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Dengan kata lain pepali Ki Ageng Sela sebagai etika politik dan pemerintahan merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku pemimpin yang terpuji karena

berpedoman pada nilai-nilai budaya dan agama.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Pada bait ketujuh tembang/ syair dhandhanggulo pepali Ki Ageng Sela mengajarkan agar kita sebagai manusia tidak berbudi (watak) saudagar. Watak saudagar disini merupakan watak yang tidak jujur dan tidak berpihak pada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu ajaran karena pada sekitar abad 16 watak saudagar menunjukkan sikap monopoli dan berorientasi pada keuntungan semata yang bertolak belakang dengan ajaran agama dan budaya masyarakat Jawa. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan (Kansil dan Kansil, 2002:238). Dengan kata lain pepali Ki Ageng Sela sebagai etika ekonomi dan bisnis terungkap agar dalam menjalankan ekonomi dan bisnis mendorong untuk jujur, etos kerja dan mengedepankan pada kepentingan masyarakat bukan sebaliknya terjadi monopoli ekonomi dan bisnis.

4. Etika Keilmuan

Pada bait keduabelas tembang/ syair dhandhanggulo pepali Ki Ageng Sela mengajarkan agar kita sebagai

manusia tidak boleh sombong dengan kepandaian, kecerdikan, dan kecerdasan yang didapatkan melalui jalur pendidikan formal seperti institut, akademi ataupun universitas. Tidak boleh merendahkan manusia lain yang tidak berkesempatan belajar secara akademis, karena akan menurunkan derajat kaum cendekiawan sekaligus memperlihatkan kedangkalan pengetahuan mereka. Lebih lanjutkan dicontohkan seperti pada yang senantiasa merunduk Ketika semakin berisi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kansil dan Kansil (2002:239) yang menyatakan bahwa Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah. Dengan demikian Etika keilmuan dalam pepali Ki Ageng Sela dalam kehidupan berbangsa merupakan proses berpikir dan bertindak untuk kebaikan kehidupan Bersama.

5. Etika Lingkungan

Pada bait ketigabelas tembang/ syair dhandhanggulo pepali Ki Ageng Sela mengajarkan agar kita sebagai manusia wajib mencintai dan memperlakukan sebaik mungkin semua makhluk karena mereka juga bersumber dari Tuhan. Hal tersebut sejalan dengan etika lingkungan sebagaimana diamanahkan dalam ketetapan MPR No.



VI/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian Pepali Ki Ageng Sela pada tembang/ Syair dhandanggulo sebagai etika kewarganegaraan merupakan landasan atau dasar dalam menentukan keputusan moral bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

IV. KESIMPULAN

Pepali Ki Ageng Selo merupakan ajaran yang disampaikan oleh Ki Ageng Sela untuk anak cucu dan seluruh masyarakat pada era kerajaan Kesultanan Demak sekitar abad 16. Ajaran tersebut berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang hendaknya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara demi tegaknya etika, sosial dan agama. Dalam konteks etika kewarganegaraan pepali Ki Ageng Sela dapat dilaksanakan dalam etika kehidupan berbangsa sebagai (1) etika sosial budaya; (2) etika politik dan pemerintahan; (3) etika ekonomi dan bisnis; (4) etika keilmuan; dan (5) etika lingkungan. Dengan demikian nilai-nilai pepali Ki Ageng Sela dapat dijadikan sebagai pengembangan etika kewarganegaraan dalam upaya memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam konteks ideologi dan dasar

negara yang bersumber pada budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, P. (2014). Mistik Kejawaen "Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa." Yogyakarta: Palapa.
- Al Muchtar, S. (2014). Etika Politik. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Anonim. (2017). Tiga Lembaga Ini Gagasan Konvensi Etika Berbangsa dan Bernegara - hukumonline.com. Retrieved January 9, 2018, from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b40c4fa8751/tiga-lembaga-ini-gagas-konvensi-etika-berbangsa-dan-bernegara>
- Bertens, K. (2007). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, H., & Wiratama, N. (2017). PENDIDIKAN NILAI DALAM TEMBANG MACAPAT DHANDANGGULA. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 9(1), 1344-1349. Retrieved from <http://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/jpp/article/view/125>
- Dhanu Priyo Prabowo. 2004. Pandangan Hidup Kejawaen Dalam Serat Pepali Ki Ageng Sela. Yogyakarta: Narasi.
- Dunham, H. W. (1964). Anomie and Deviant Behavior: A Discussion and Critique. (M. B. Clinard, Ed.). London: Free Press of Glencoe.
- Hadiwijaya. 2010. Tokoh-Tokoh Kejawaen Ajaran dan Pengaruhnya. Yogyakarta: Eule Book.
- Herusatoto, B. (2012). Mitologi Jawa. Depok: Oncor Semesta Ilmu.
- Hikam, A. S. (1999). Politik Kewarganegaraan: Landasan



- Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kansil, C. S. T. dan S. T. Kansil. 2002. Model Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khoiriyah. (2015). Akulturasi Budaya dalam Syair Shalawat Ahbabul Musthafa Surakarta. *Jurnal Intelegensia* – Vol. 03 No. 01. DOI: <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v3i1.1335> hal 18-36
- Lazzavietamsi, F. A. (2019). Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.21067/jmk.v3i2.2910>
- Prabowo, D. P. (2004). Pandangan Hidup Kejawen dalam Serat Pepali Ki Ageng Sela. Yogyakarta: Narasi.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Powell, E. H. (1988). *The Design of Discord Studies of Anomi* (2, illustrated). London: Transaction Books.
- Ronika Rima. (2019). CORAK AJARAN TASAWUF DALAM PÉPALI KI AGÊNG SELO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIK FRIEDRICH DANIEL ERNST SCHLEIERMACHER. Refleksi, Vol. 19, No.2, doi.org/10.14421/ref.2019.1902-04 halaman 177-204
- Soeryohoedoyo, S. (1989). Puncak-puncak dalam Pandangan Kesusilaan Kefilsafatan dan Ketuhanan dalam Kesusastraan Jawa. Surabaya: CV. Citra Jaya.
- Sudarto. (2002). Metode Penelitian Filsafat (1 cetakan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, F. M. (1987). Etika Dasar: Masalah - masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
- Tambak, R. (2017). Zulkifli Dukung Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Retrieved January 9, 2018, from <http://politik.rmol.co/read/2017/02/23/281583/Zulkifli-Dukung-Konferensi-Nasional-Etika-Kehidupan-Berbangsa-Dan-Bernegara->
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (2006). Retrieved from <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU12-2006KewarganegaraanRI.pdf>

